

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing.

A. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Barito Selatan 2011-2016 adalah keadaan yang diharapkan terwujud dalam masa lima tahun. Visi tersebut merupakan sebuah perencanaan yang dilakukan pelaksanaannya dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.

Sejalan dengan visi-misi bupati dan wakil bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Barito Selatan tahun 2011-2016 adalah:

“Terwujudnya Kondisi yang mantap dalam Tatanan Masyarakat Barito Selatan menuju Dahani Dahana Tuntung Tulus”

Rumusan visi antara lain diharapkan memberikan gambaran arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah; disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program. Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya.

Terwujudnya kondisi yang mantap bermakna bahwa

1. Terwujudnya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
2. Berjalannya kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati

- kepercayaan dan keyakinan masing-masing.
3. Masyarakat berperikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.
 4. Berkemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan memiliki kemampuan dalam ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat.

Dahani Dahanai Tuntung Tulus mengandung makna Selamat Sentosa, Adil dan Makmur Sampai Selama lamanya diwujudkan dalam bentuk:

1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi di atas periode 2006-2011.
2. Peningkatan dukungan infrastruktur kota Buntok hingga ke kecamatan dan desa
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan membaiknya pendapatan masyarakat.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak sosial rakyat akan pendidikan, kesehatan, kepastian bekerja, membaiknya fasilitas umum, dan membaiknya lingkungan hidup.

B. MISI

Untuk mencapai Visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan 7 (tujuh) Misi yaitu :

1. Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur untuk membuka isolasi daerah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan jembatan, dermaga, dan pelabuhan udara, sehingga memiliki keterkaitan antara daerah satu dengan yang lain.
2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata serta terakses.
3. Menjamin kesehatan dasar masyarakat yang merata dan terakses.
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang.
5. Mengembangkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah, penguatan kapasitas SDM masyarakat dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih baik untuk mewujudkan Good Governance.
6. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, dalam kehidupan yang dinamis didalam keberagaman agama, suku, ras dan golongan dengan memberikan pembinaan kehidupan berpolitik dan menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

7. Meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan hutan dan memanfaatkan potensi pertambangan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah

Penjelasan atas masing-masing misi dan keterkaitannya dalam mendukung pembangunan Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Misi 1 : Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur untuk membuka isolasi daerah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan jembatan, dermaga, dan pelabuhan udara, sehingga memiliki keterkaitan antara daerah satu dengan yang lain.

Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi berjalannya roda pembangunan daerah meliputi permasalahan aksesibilitas daerah, irigasi teknis, dan kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup: (1) masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antarkecamatan dan desa ; (2) karakteristik geomorfologi pembentukan wilayah Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari daerah rawa dan daerah aliran sungai, menyebabkan Kabupaten Barito Selatan membutuhkan transportasi yang memadukan antar a transportasi darat dan sungai ; (3) Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.

Pertanian merupakan sektor/sub-sektor yang mesti mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, ketersediaan dan operasional sarana irigasi teknis menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung agar sektor pertanian terus dapat dipacu pertumbuhannya. Kondisi tersebut terlihat dengan data tahun 2010, dimana luas lahan pertanian dengan pengairan sederhana mencapai 8.705 Ha, sedangkan luas pengairan semi teknis 500 Ha.

Peningkatan penataan kota Buntok sebagai i Pusat Kegiatan Wilayah mesti juga mendapat perhatian. Berbagai sarana dan prasarana infrastruktur masih perlu ditingkatkan. Gambaran kondisi jalan di Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut.

Kondisi j alan Strategis Nasional berstatus Jalan Nasional adalah ruas Jalan yang menghubungkan:

Buntok – Timpah – Bukit Rawi – Palangka Raya. Kondisi Perkerasan jalan saat ini sebagian rusak sangat berat (Ruas Buntok-Timpah) dan sebagian lagi masih belum dilapisi aspal.

Buntok – Bambulung – Ampah – Tamiang Layang Kondisi Perkerasan jalan saat ini sebagian rusak sangat berat (Ruas Buntok-Sababilah)

sebagian sudah berlapis aspal dan sebagian lagi masih belum dilapisi aspal Jalan Kolektor 1 (K1) yang berstatus jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan Kota Banjarmasin – Banjarbaru – Martapura – Kandangan- Amuntai - Tamiang Layang – **Kabupaten Barito Selatan** - Kabupaten Barito Utara – Murung Raya. Kondisi perkerasan jalan saat ini sudah beraspal atau hotmik sebagian lagi masih dalam kondisi Rusak Berat. Dengan demikian jalan kolektor primer K1 ini juga merupakan ruas jalan utama yang menghubungkan dua kecamatan utama di Kabupaten Barito Selatan yakni kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara.

Dengan demikian, meskipun pembangunan perekonomian mulai membaik, secara umum pembangunan dibidang infrastruktur masih dihadapkan pada berbagai kendala dimana masih buruknya kualitas jalan dengan kondisi sedang 241,50 km, rusak berat dan rusak, meliputi jalan kabupaten 65 km dan rusak berat 5,73 km. Hampir 90% lebih kondisi jembatan yang diwilayah Barito Selatan masih jembatan kayu sementara kemampuan anggaran infrastruktur hanya dalam kisaran 60 milyar per tahun, yang idealnya 300 milyar pertahun. Oleh sebab itu, peningkatan infrastruktur menjadi salah satu misi utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Misi pertama ini sejalan dengan misi ke empat dalam RPJMD Kalteng 2010-2014 yaitu Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman dan memfasilitasi ekonomi rakyat.

Misi 2: Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata serta terakses.

Di bidang sumber daya manusia permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain belum meratanya jenjang pendidikan di daerah karena kondisi wilayah yang terpencil. Di samping itu juga kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik yang disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, terbatasnya jumlah guru dan belum memadainya fasilitas belajar terutama buku pelajaran, peralatan peraga pendidikan karena terbatasnya dana yang tersedia.

Kabupaten Barito Selatan memiliki berbagai masalah dalam dunia pendidikan, di antaranya karena terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, masih rendahnya tingkat kualitas dan kesejahteraan guru, serta masih

terbatasnya mutu pendidikan. Sumber daya manusia Barito Selatan masih perlu ditingkatkan. Dari jumlah penduduk 127.058 jiwa tingkat pendidikan penduduk tidak tamat SD mencapai 21,16%, SD 32,24%, SLTP 20,60%, SLTA 17,61%, SMK 1,25%, D1 1,46%, D3 0,96%, D4/S1 2,82%, dan S2/S3 0,13%.

Pendidikan merupakan ujung tombak sebuah kemajuan daerah. Tingkat kesejahteraan daerah salah satunya dapat diukur melalui seberapa besar tingkat kemajuan yang diraihinya. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata serta terakses merupakan upaya bersama untuk mendukung Program Kalteng Harati. Program ini merupakan tiang utama pendukung Program Kalteng Harati yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Misi 3: Menjamin kesehatan dasar masyarakat yang merata dan terakses.

Indikator kondisi kesehatan di Kabupaten Barito Selatan masih mengahfapi tantangan. Jumlah dokter dan dokter spesialis di, khususnya di Barito Selatan belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Perkembangan di tahun 2011 jumlah tenaga kesehatan mencapai 442 orang, pertambahan cukup signifikan adalah jumlah bidan dan perawat. Sementara tenaga dokter spesialis hanya bertambah 1 orang dokter sejak tahun 2006 hingga 2010, yaitu dari 5 menjadi 6 dokter spesialis.

Hingga tahun 2010 pembangunan prasarana kesehatan untuk masyarakat seperti Pos Kesehatan Desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah Pos Kesehatan Desa tahun 2007 terdapat 10 unit dan di tahun 2010 naik menjadi 58 unit, namun jumlah Puskesmas relatif tetap sejak tahun 2007 sampai tahun 2010. Secara geografis pada tahun 2011, hampir seluruh desa di wilayah Kabupaten Barito Selatan telah memiliki sarana kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan atau Pos Kesehatan Desa), sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah.

Rasio dokter (dokter umum) per jumlah penduduk hingga tahun 2007 relatif belum ideal karena seorang dokter umum harus menangani lebih dari 6.206 orang penduduk. Pada tahun 2010 jumlah keseluruhan dokter berjumlah 30 orang, untuk jumlah penduduk sebesar 124.128 jiwa, sehingga seorang dokter harus melayani lebih dari 4.138 jiwa.

Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter umum dan dokter spesialis di, khususnya Barito Selatan belum memenuhi kebutuhan sesuai

rasio jumlah penduduk. Selain itu, distribusi dokter umum dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan jaminan kesehatan masyarakat ini sejalan dengan Program Kalteng Barigas dan mendukung upaya mencapai standar MDG's pada tahun 2015 yakni sebanyak 19 per seribu kelahiran hidup.

Misi 4: Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang.

Upaya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat terus diupayakan dalam periode pembangunan selama ini. Program pemerintah melalui kawasan pengembangan ekonomi terpadu Daerah Aliran Sungai Barito (KAPET DAS Barito) yang berada di dalam dan membelah wilayah Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu potensi untuk pengembangan ekonomi masyarakat, namun pada beberapa kawasan tertentu telah mengalami penurunan fisik lingkungan sehingga terjadi longsor dan banjir sehingga harapan terjadinya peningkatan manfaat ekonomi masyarakat masih harus terus diupayakan.

Secara umum tingkat kesejahteraan rakyat masih rendah, yang tercermin dari tingkat pendapatan yang masih rendah yang berakibat sulitnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini diakibatkan oleh daya dorong perekonomian, penyediaan infrastruktur terbatas, sempitnya lapangan pekerjaan dan penurunan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kabupaten Barito Selatan memiliki stigma sebagai daerah yang relatif kurang berkembang, dengan indikator rendahnya investasi, pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi, sebagian besar desa relatif tertinggal, sektor perdagangan dan industri relatif lambat berkembang.

Permasalahan dalam bidang ekonomi antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, penanganan budidaya perikanan, pengembangan tata niaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi. Peluang untuk meningkatkan ekonomi daerah masih terbuka di antaranya dengan kondisi antara lain: (a) Kabupaten Barito Selatan memiliki peluang untuk meningkatkan nilai tambah, volume

perdagangan domestik, dan devisa dari beragam komoditas potensial, di antaranya adalah karet, kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, duku, nenas, ikan, dan lain-lain ; (b) Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan ikan budidaya, khususnya dalam menghasilkan sumber daya protein ikan yang termurah. Hingga tahun 2010, produksi perikanan masih di bawah potensi lestari yaitu 60 kh/ha/tahun atau 7.003 ,25 ton yang didominasi oleh hasil perikanan budidaya (9,92%) dan perairan umum (81,78%); (c) Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi pariwisata yang cukup beragam dan layak dikembangkan, baik wisata alam, wisata sejarah, maupun wisata budaya. Potensi obyek wisata alam adalah taman maupun wisata budaya. Potensi obyek wisata alam adalah taman nasional, sungai, dan danau; (d) Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi pertambangan dengan Kuasa Pertambangan (KP) sebanyak 32 perusahaan di mana 15 KP dalam tahap eksplorasi dan 18 KP sudah operasi produksi bahan galian batubara. Potensi pertambangan yang dapat dikembangkan adalah terdapat di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai, dimana untuk tambang Batubara diperkirakan tersimpan potensi \pm 250 juta ton (terduga)/ 160 juta ton (terukur).

Misi 5 : Mengembangkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah, penguatan kapasitas SDM masyarakat dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih baik untuk mewujudkan Good Governance.

Survei KPPOD tahun 2009 mengenai pelayanan penanaman modal menyebutkan bahwa Kabupaten Barito Selatan secara nasional berada di peringkat 169 (survey KPPOD tahun 2009). Kelemahan utama adalah pada sub indeks Inovasi dan Capaian. Sub Indeks Inovasi dan Capaian Keberhasilan ditujukan untuk melihat bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta sejauh mana capaian dari pelayanan yang selama ini mereka lakukan.

Kondisi tersebut adalah salah satu untuk perlunya penguatan SDM yang mestu dilakukan secara terencana dan terus menerus di lingkungan pemerintahan, termasuk pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain). Transformasi mentalitas birokrasi akan terus dilanjutkan dalam rangka memantapkan sistem *good governance* yang sudah mulai terintis

dalam beberapa tahun belakangan, selain upaya penguatan kapasitas inovasi birokrasi melalui berbagai program beasiswa pendidikan dan pelatihan. Khususnya untuk aparatur pelayanan langsung; misalnya guru, petugas kesehatan, dan penyuluh lapangan, pengembangan dan penguatan kapasitas akan terus dilakukan.

Upaya sertifikasi guru dan *updating* kemampuan profesional pendidikan akan menjadi perhatian utama, sama halnya dengan peningkatan profesionalitas tenaga pelayanan dan penyuluhan masyarakat lainnya.

Penguatan kapasitas SDM masyarakat bisa dilakukan melalui pengembangan pendidikan dan kesehatan, sebagaimana ter jelaskan dalam misi kedua dan ketiga. Selain mengembangkan pendidikan dasar yang menjadi tanggungjawab dasar negara, pengembangan kapasitas SDM Barito Selatan juga akan ditempuh melalui pembukaan sekolah vokasional (kejuruan) yang memungkinkan generasi muda secara cepat terserap dalam lapangan-lapangan ekonomi baru yang sedang berkembang dan akan menguat di tahun-tahun mendatang.

Pengembangan pendidikan tinggi, dalam hal ini pengembangan sekolah kejuruan atau politeknik pertambangan serta bidang pertanian/perkebunan, juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari penguatan SDM masyarakat.

Misi 6: Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, dalam kehidupan yang dinamis di dalam keberagaman agama, suku, ras dan golongan dengan memberikan pembinaan kehidupan berpolitik dan menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Misi keenam ini sejalan dengan misi ketujuh RPJMD Kalimantan Tengah 1010-2015 yaitu dalam upaya meningkatkan pembangunan dan terbukanya isolasi serta dampaknya, maka diperlukan adanya suatu program yang komprehensif dan holistik guna terciptanya kerukunan dan keharmonisan serta kesejahteraan rakyat di Barito Selat dengan semangat HUMA BETANG dan BHINNEKA TUNGGAL IKA. Implementasi program ini disamping melalui forum yang sudah ada seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), juga harus secara berkesinambungan dimasyarakatkan nilai-nilai positif kemajemukan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh lainnya seperti para Damang, sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah serta kerukunan dan kedamaian antar suku, ras dan golongan masyarakat di

Barito Selatan . Upaya yang dilakukan antara lain melalui program Peningkatan kualitas kehidupan beragama dengan penyediaan sarana kenyamanan pelaksanaan ibadah dan kerukunan antar umat beragama. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan meningkatkan Jumlah Siswa, mahasiswa, ormas/LS M dan p eningkatan pendidikan politik masyarakat dengan mengintensifkan k erjasama dengan ormas/LSM, partai politik dan lembaga legislatif

Misi 7 : Meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan hutan dan memanfaatkan potensi pertambangan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah

Kondisi wilayah di Barito Selatan diindikasikan dengan perlunya r ehabilitasi kerusakan akibat banjir dan longsor ; p erlindungan daerah tangkapan air ,hutan lindung dan hutan monumental ; perbaikan kondisi sumber daya alam yang sudah terganggu/ rusak ; k onservasi dan rehabilitasi lahan melalui penghijauan dan reboisasi ; p encegahan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ; p enertiban perizinan bidang kehutanan, perambahan hutan,illegal logging dan industri pengolahan kayu ; pengembangan dan pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat ; peningkatan kesad aran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman hutan lestari ; p enertiban perizinan pertambangan ; dan pengembangan pemanfaatan potensi tambang dengan bekerjasama dengan investor.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

1. Tersedianya infrastruktur dan prasarana umum
2. Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau
3. Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah
4. Meningkatnya sistem kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau
5. Tersedianya akses infrastruktur kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah
6. Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan terpadu
7. Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar
8. Meningkatnya daya saing masyarakat

9. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah
10. Terwujudnya soliditas antar kelompok masyarakat
11. Tercapainya pemanfaatan sumber daya hutan yang optimal
12. Termanfaatkannya potensi sumberdaya mineral

Keduabelas tujuan di atas merupakan representasi dari keinginan yang diwujudkan secara nyata melalui visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan untuk periode yang akan berakhir pada tahun 2016. Secara teknokratik, gambaran nyata dari cita-cita pembangunan di atas akan dicapai secara bertahap, sinambung, dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan APBD.

Indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama masa 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah.

Pertama, Peningkatan infrastruktur dan prasarana umum.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya dan terpeliharanya jaringan jalan, jembatan, terminal dan dermaga baik jalan kabupaten, jalan antar kecamatan, jalan antar desa menuju pusat - pusat pertumbuhan dan kantong produksi.

Indikator:

- Panjang jalan dalam kondisi baik
- Jumlah rehab jembatan
- Panjang jalan antar kawasan tumbuh kecamatan dan desa
- Terehabilitasi terminal angkutan darat dan air
- Meningkatnya fasilitas bandara peningkatan Fasilitas Gedung Bandara, Apron dan Taxi Way Bandara.

2. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.

Indikator

- Rasio jaringan irigasi
- Luas dan panjang irigasi dalam kondisi baik

3. Pembangunan dan pengembangan hutan kota dan taman kota.

Indikator

- Terbangunnya taman kota

4. Pengadaan dan pengembangan Listrik masuk desa.

Indikator

- Rasio elektrikal
- Pembangunan PLTU Batubara 2x7 MW

5. Penetapan Dasar Hukum Penataan Ruang

Indikator:

Tersusunnya Perda Tata Ruang

Kedua, terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau

Untuk mewujudkan tujuan ketiga tersebut, maka dipilih 4 (empat) sasaran untuk mencapainya sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Indikator :

- Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
- Jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
- Rupiah per-pendidik
- Rupiah per-tenaga kependidikan

2. Penaatan sistem pendidikan yang efektif dan efisien.

Indikator : - APS

- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
- Rasio guru/murid
- Angka putus sekolah
- Angka kelulusan
- Angka melanjutkan
- Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Ketiga, tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah

Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Indikator:

Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga pendidik

Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga kependidikan

Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat pendidikan

Indikator

- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
- Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
- Panjang jalan fungsional/waktu tempuh (jam)/biaya transport (rupiah)

Keempat, meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukanlah sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya standar pelayanan kesehatan.

Indikator :

- Regulasi standar pelayanan kesehatan

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan.

Indikator :

- Rasio dokter per satuan penduduk
- Rasio tenaga medis per satuan penduduk
- Jumlah dokter yang memiliki ijin praktek

Kelima, tersedianya akses infrastruktur kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukanlah sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan.

Indikator :

- Rasio posyandu persatuan balita
- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk
- Rasio rumah sakit persatuan penduduk

2. Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Indikator :

- Panjang jalan fungsional/waktu tempuh (jam)/biaya transport (rupiah)
- Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Keenam, Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomikerakyatan

Indikator :

- Perda/Perkada bidang ekonomi

2. Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat

Indikator :

- Persentase koperasi aktif
- Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
- Jumlah BPR/LKM

3. Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan

Indikator :

- Jumlah Pelatihan

4. Terciptanya produktifitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal.

· Indikator : - PDRB

Ketujuh, terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Terlaksananya program pembangunan daerah berbasis kemitraan usaha

Indikator :

- Jumlah Kemitraan

2. Meningkatkan daya saing dan orientasi ekspor komoditas-komoditas lokal

Indikator :

- Jumlah ekspor komoditas lokal

Kedelapan , meningkatnya daya saing masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjang kegiatan ekonomi.

Indikator :

- Jumlah pelatihan

Kesembilan, meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis.

Indikator :

- Jumlah pelatihan

Kesepuluh, terwujudnya soliditas antar kelompok masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera

Indikator :

- Angka kriminalitas
- Jumlah unjuk rasa
- Sikap toleransi

2. Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal.

Indikator :

- Jumlah grup kesenian
- Jumlah gedung kesenian

Kesebelas, tercapainya pemanfaatan sumber daya hutan yang optimal

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan diversifikasi inventasi usaha di bidang kehutanan

Indikator:

- Investasi usaha di bidang kehutanan

2. Menertibkan penatausahaan hasil hutan.

Indikator:

- Pemetaan kawasan hutan

Keduabelas, termanfaatkannya potensi sumberdaya mineral

1. Pemanfaatan sumberdaya mineral pertambangan

Indikator

- Terserapnya tenaga kerja
- Jumlah AMDAL
- PAD

Tabel 5.1 mengintegrasikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan Kabupaten Barito Selatan.

Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Selatan

Visi : Terwujudnya Kondisi yang mantap dalam Tataan Masyarakat Barito Selatan menuju Dahani Dahandai Tuntung Tulus

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur untuk membuka isolasi daerah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan jembatan,dermaga, dan pelabuhan udara,sehingga memiliki keterkaitan antara daerah satu dengan yang lain	1.Tersedianya infrastruktur dan prasarana umum	1. Tersedianya dan terpeliharanya jaringan jalan, jembatan, terminal dan dermaga baik jalan kabupaten,jalan antar kecamatan, jalan antar desa menuju pusat - pusat pertumbuhan dan kantong produksi.	Panjang jalan dalam kondisi baik Jumlah rehab jembatan Panjang jalan antar kawasan tumbuh kecamatan dan desa Terehabilitasi terminal angkutan darat dan air Meningkatnya fasilitas bandara
		2. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.	Rasio jaringan irigasi Luas dan panjang irigasi dalam kondisi baik
		3. Pembangunan dan pengembangan hutan kota dan taman kota.	Terbangunnya taman kota
		4. Pengadaan dan pengembangan Listrik masuk desa.	2.Rasio elektrikal 3.Pembangunan PLTU Batubara 2x7 MW
		5. Penetapan Dasar Hukum Penataan Ruang	Perda Tata Ruang
2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merta serta terakses	2. Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau.	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Rupiah perpendidik Rupiah per-tenaga kependidikan
		Penataan sistem pendidikan yang efektif dan efisien	APS Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Rasio guru/murid Angka putus sekolah Angka kelulusan Angka melanjutkan Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
	3. Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah	Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga pendidik Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga kependidikan
		Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

		Pendidikan	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik Panjang jalan fungsional/ waktu tempuh (jam)/biaya transport (Rp.)
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
3 : Menjamin kesehatan masyarakat yang merata dan terakses.	4. Meningkatnya sistem kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau	Tersedianya standar pelayanan kesehatan	Regulasi standar pelayanan kesehatan
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Jumlah dokter yang memiliki ijin praktek
	5. Tersedianya akses infrastruktur kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan	Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk
		Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Panjang jalan fungsional/ waktu tempuh (jam)/biaya transport (Rp.) Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>
4 . Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan ,teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang.	6. Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan terpadu	Tersedianya regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan	Perda/Perkada bidang ekonomi dan usaha
		Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat	Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM
		Meningkatkan kemampuan manajerial perilaku ekonomi kerakyatan	Jumlah pelatihan / workshop
		Terciptanya produktivitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal	PDRB
	7. Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar	Terlaksananya program pembangunan daerah berbasis kemitraan usaha	Jumlah kemitraan
		Meningkatkan daya saing dan orientasi ekspor komoditas- komoditas lokal	Jumlah ekspor komoditas lokal
5 : Mengembangkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah, penguatan kapasitas SDM masyarakat dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih baik untuk mewujudkan Good Governance.	8. Meningkatnya daya saing masyarakat	Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjang kegiatan ekonomi	Jumlah pelatihan
	9. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah	Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	Jumlah pelatihan
6 : Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, dalam kehidupan yang dinamis didalam keberagaman agama, suku, ras, dan golongan dengan memberikan pembinaan kehidupan berpolitik dan menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia	10. Terwujudnya soliditas antar kelompok masyarakat	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal	Angka kriminalitas Jumlah unjuk rasa Sikap toleransi Jumlah grup keseniaan Jumlah gedung keseniaan Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga Jumlah mesjid, mushola Jumlah Gereja Jumlah Tempat Ibadah lainnya

7 : Meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan hutan dan memanfaatkan potensi pertambangan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah	11. Tercapainya pemanfaatan sumber daya hutan yang optimal	Meningkatkan diversifikasi inventasi usaha di bidang kehutanan	Investasi usaha di bidang kehutanan
		Menertibkan penatausahaan hasil hutan.	Pemetaan kawasan hutan
	12. Termanfaatkannya potensi sumberdaya mineral	Pemanfaatan sumberdaya mineral pertambangan	Terserapnya tenaga kerja Jumlah AMDAL PAD

